

PRAKTIK PENETAPAN BIAYA JASA NOTARIS UNTUK PEMBUATAN

AKTA OTENTIK DI KOTA PAYAKUMBUH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Di Fakultas Hukum Universitas Andalas

TESIS



Disusun oleh:

RANI PERMATA SARI

232012003

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

PRAKTIK PENETAPAN BIAYA JASA NOTARIS UNTUK PEMBUATAN AKTA OTENTIK DI KOTA PAYAKUMBUH

*Rani Permata Sari, 232012003, Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2025*

ABSTRAK

Salah satu penyebab timbulnya persaingan tidak sehat antar rekan Notaris adalah penetapan tarif jasa Notaris atau honorarium di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan Kode Etik. Hal tersebut sangat bertentangan dengan apa yang diatur UUJN maupun Kode Etik Notaris, karena Notaris dilarang melakukan upaya penetapan jasa tarif dibawah standar untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin, akan tetapi dalam praktiknya terdapat oknum Notaris yang melakukan hal tersebut. Untuk itu dalam hal seperti ini perlu adanya pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap penerapan honorarium Notaris Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimanakah praktik penetapan biaya jasa Notaris terkait pembuatan akta otentik? 2. Apakah yang mempengaruhi adanya persaingan dalam hal penetapan jasa Notaris dalam pembuatan Akta? 3. Bagaimanakah usaha yang dilakukan agar tidak terjadi persaingan tidak sehat antar Notaris dalam hal penetapan jasa Notaris dalam Pembuatan Akta? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan data sekunder dan data primer adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Hasil penelitian pengaturan penetapan honorarium Notaris dalam pembuatan akta, terdapat dalam Pasal 36 Ayat (2) UUJN berbunyi, “Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.. Dari beberapa persen nilai sosiologis dan ekonomis perlu ditetapkan” Hal ini sangatlah sulit dikarenakan Notaris menentukan nilai pasti sosiologis terhadap dibuatkannya akta tersebut. Kenyataanya UUJN Pasal 36 ayat (2) kurang memuaskan, bisa dikatakan besar honorarium yng dibuat oleh pejabat umum berdasarkan nilai pasti ekonomis dan nilai pasti sosiologis dari semua akta yang dibuat. Pengaturan kode etik Notaris di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas profesi Notaris sebagai pejabat publik yang berfungsi menyusun akta otentik. Kode etik tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Notaris berlandaskan pada prinsip profesionalitas, objektivitas, serta kepentingan masyarakat dan negara. Pengawasan oleh organisasi Notaris dalam penetapan honorarium Notaris sehubungan dengan pembuatan akta di kota Payakumbuh. Pengawasan dari Ikatan Notaris Indonesia terhadap perilaku dan tindakan Notaris di Payakumbuh agar tidak muncul persaingan yang tidak sehat melalui penetapan tarif :

Kata Kunci: Biaya Jasa, Notaris, Akta Notaris

PRACTICE OF DETERMINING NOTARY SERVICE FEES FOR MAKING AUTHENTIC DEEDS IN PAYAKUMBUH CITY

Rani Permata Sari, 232012003, Master Of Notary Law,

Faculty of Law, Andalas University, 2025

ABSTRACT

The emergence of improper competition among notaries is partly due to the imposition of service charges or honorariums that are lower than the provisions outlined in the Law and the Ethical Guidelines. This is very contrary to what is regulated by the UUJN and the Notary Code of Ethics, because notaries are prohibited from making efforts to determine service rates below the standard to get as many clients as possible, but in practice there are notaries who do this. For this reason, in cases like this, there needs to be supervision by the Notary Supervisory Board regarding the implementation of Notary honorariums. The formulation of the problem in this study is: 1. How is the Practice of Determining Notary Service Fees Related to Making Authentic Deeds? 2. What influences competition in terms of determining Notary services in making Deeds? 3. What efforts are made to prevent unhealthy competition between Notaries in terms of determining Notary services in Making Deeds? This study uses an empirical legal method, using secondary data and primary data, while the data collection tool in this study uses interviews. Research results on the determination of honorarium for Notaries in making deeds, are contained in Article 36 Paragraph (2) of the UUJN which states, "The amount of honorarium received by a Notary is based on the economic and sociological value of each deed he makes. From several percent of the sociological and economic value needs to be determined" This is very difficult because the Notary determines the exact sociological value of the deed being made. In reality, UUJN Article 36 paragraph 2 is less than satisfactory, it can be said that the amount of honorarium made by public officials is based on the exact economic value and the exact sociological value of all deeds made. The regulation of the notary code of ethics in Indonesia has a very important role in maintaining the integrity and credibility of the notary profession as a public official whose function is to prepare authentic deeds. The code of ethics aims to ensure that every action taken by a notary is based on the principles of professionalism, objectivity, and the interests of the community and the state. Supervision by the Notary organization in determining the Notary's honorarium in connection with the making of deeds in the city of Payakumbuh. Supervision by the Indonesian Notary Association on the behavior and actions of Notaries in Payakumbuh to prevent unhealthy competition through tariff determination.

Keywords: Service Fees, Notaries, Notarial Deeds

